



Majelis Pendidikan Daerah
Aceh

ISSN: 1693 – 1775

Jurnal Pencerahan
Volume 8, Nomor 2, 2014
Halaman 98-108

PROBLEMATIKA KURIKULUM 2013 DAN KEPEMIMPINAN INSTRUKSIONAL KEPALA SEKOLAH

Syarwan Ahmad

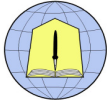
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh

Abstrak : Sejak kemerdekaan 1945, Indonesia telah mengalami sebelas kali perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum, antara lain, bertujuan untuk menyesuaikan kurikulum pendidikan dengan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, setiap kali perubahan kurikulum dilakukan, selalu saja disambut pro dan kontra. Kurikulum 2013 menuai banyak kritik dan protes. Kritik dan protes datang dari berbagai kalangan menyangkut isi dan kemasan kurikulum, kesiapan guru dan lain-lain. Tulisan ini mencoba memberikan salah satu solusi terhadap masalah-masalah implementasi kurikulum 2013. Kepemimpinan instruksional kepala sekolah direkomendasikan menjadi salah satu solusi bagi efektivitas implementasi kurikulum 2013. Kepemimpinan instruksional merupakan kepemimpinan kepala sekolah yang memprioritaskan belajar-mengajar dalam kepemimpinannya. Kepala sekolah yang berpihak kepada akademik, kepemimpinan instruksional diyakini akan mampu menyelesaikan masalah-masalah implementasi kurikulum 2013. Pengutamaan keterlibatan kepala sekolah dalam orientasi dan pelatihan-pelatihan implementasi kurikulum 2013 direkomendasikan.

Kata kunci : Problematika kurikulum 2013, Kepemimpinan Instruksional, Sekolah.

PENDAHULUAN

Indonesia sudah mengalami beberapa kali perubahan kurikulum. Menurut Suparlan (2012), kurikulum pertama Indonesia adalah Rencana Pelajaran 1947. Ketika itu, istilah kurikulum belum digunakan. Kemudian, Rencana Pelajaran 1947 ini diubah menjadi Rencana Pelajaran 1950. Selanjutnya diganti dengan Rencana Pelajaran 1958. Rencana pelajaran ini kemudian direvisi menjadi Rencana Pelajaran 1964. Setelah itu rencana pelajaran ini diganti menjadi Kurikulum 1968. Sejak inilah istilah rencana pelajaran

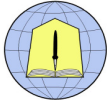


yang sudah digunakan selama bertahun-tahun berganti nama menjadi kurikulum. Kemudian, kurikulum ini dirubah lagi menjadi Kurikulum 1975. Selanjutnya, Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 dan terakhir Kurikulum 2013.

Perubahan yang terakhir ini adalah amanat perubahan metodologi pembelajaran dan penataan kurikulum dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Selain itu, perubahan ini dilakukan sebagai penyempurnaan kurikulum dengan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk manusia Indonesia yang berdaya saing dan berkarakter sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010. Perubahan atas dasar ini didukung oleh teori pengembangan kurikulum, antara lain, dikemukakan oleh Hamalik (2012) bahwa kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan dampak terhadap sistem pengajaran, sehingga pembelajaran mengalihkan pendekatannya dari pendekatan tradisional ke pendekatan mutakhir.

Perubahan kurikulum juga merupakan akibat dari perkembangan masyarakat. Kita tidak ingin membangun generasi yang terpisah dengan perkembangan masyarakatnya. Kita mendidik generasi yang akan hidup di zaman yang berbeda dengan kita. Kita mendewasakan mereka melalui pendidikan yang tidak usang yang muatannya tertuang di dalam kurikulum (Sukmadinata, 2012). Dalam suatu sistim pendidikan, kurikulum itu sifatnya dinamis serta harus selalu dilakukan perubahan dan pengembangan, agar dapat mengikuti perkembangan dan tantangan zaman (Mulyasa, 2013). Perubahan kurikulum pendidikan suatu negara biasanya diprakarsai oleh kementerian pendidikan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh mengatakan akan konsisten dan terus maju dengan rencana implementasi kurikulum 2013 meskipun kritik dan protes datang bertubi-tubi dari berbagai kalangan. Umumnya kritik-kritik tersebut datang dari guru, edukator dan pemerhati pendidikan. Menurut Muhammad Nuh, mutu pendidikan Indonesia akan terus memburuk kalau kurikulum baru ini tidak dilaksanakan. Dengan mengatakan “masa depan negeri ini tergantung kepada kurikulum 2013” (Saragih, 2013).

Sementara itu, Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (2013) menyambut baik penerapan kurikulum baru yang merupakan kurikulum pendidikan ke-sebelas selama negara Indonesia berdiri. Beliau mengatakan bahwa penerapannya akan meningkatkan toleransi beragama. Dalam salah satu rapat kabinet di Istana Negara, Yudhoyono memberi pencerahan, antara lain :



“Pendidikan tidak hanya menciptakan orang cerdas, tetapi juga melatih orang Indonesia menjadi tangguh secara mental, sehat jasmani, toleran dan bisa hidup harmonis dengan orang lain yang berbeda agama, ras, dan suku. Dengan menyiapkan tolerance-centered curriculum, intoleran yang berpotensi menjadi kekerasan, dapat distop arusnya.”

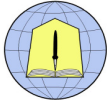
Namun banyak kalangan yang menyebutkan bahwa diimplementasikan kurikulum 2013 ini dianggap terlalu tergesa-gesa dalam pelaksanaannya sehingga menuai banyak kritikan karena dianggap memiliki segudang masalah. Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan problematika kurikulum 2013 dan mencoba memberi alternatif solusi bagi suksesnya implementasi kurikulum 2013, melalui Kepemimpinan Instruksional (*Instructional Leadership*).

MASALAH-MASALAH KURIKULUM 2013

Masalah Isi dan Kemasan

Kurikulum baru ini yang rencana pelaksanaannya menghabiskan anggaran hingga 2,49 triliun telah menuai banyak kritik, termasuk dari kalangan aktivis, antara lain, karena membuang sains dan menggantikannya dengan pendidikan kewarganegaraan (*civics*) dan pelajaran agama. Jadi, kurikulum baru ini lebih banyak muatan pendidikan kebangsaan dan agama, sedangkan sains atau IPA akan digabung ke dalam dua mata pelajaran tersebut. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh, yang dikutip oleh berbagai media massa, tidak lucu mengintegrasikan pendidikan kebangsaan dan pendidikan agama dengan pelajaran kimia dan ini akan membuat anak menjadi lebih kreatif. Muhammad Nuh juga mempertahankan keputusan menteri untuk menambah jam pelajaran agama dengan harapan penambahan dua jam pelajaran agama akan membantu program pembasmian teroris. Muhammad Nuh berkeyakinan bahwa gerakan teroris tidak dipicu oleh lamanya jam pelajaran agama di sekolah. Justru aksi terorisme yang semakin meningkat di Indonesia, menurutnya, karena tidak lengkapnya pendidikan agama. Oleh karena itu, kita perlu menambah jam pelajaran agama.

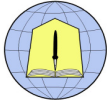
Salah seorang pengamat pendidikan, Sakhiyya (2013) mempertanyakan kesesuaian kurikulum 2013 untuk semua seting sekolah. Sebab pada kurikulum 2013 ini guru tidak diharuskan menyiapkan silabus. Sedangkan kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum KTSP 2006 mewajibkan guru merancang sendiri silabus setelah mengidentifikasi kebutuhan siswa. Berbeda dengan kurikulum KTSP 2006, kurikulum 2013 yang baru diperkenalkan ini dibungkus dalam satu paket bersama silabus. Dalam suatu wawancara, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh mengatakan pemerintah akan menyiapkan kurikulum dalam satu paket bersama



silabusnya. Ini bisa menjadi berita bagus bagi sebagian guru, tetapi mungkin tidak untuk sebagian yang lain. Sakhiyya (2013) menganalogikan kebijakan kurikulum sepaket dengan silabus yang dibuat pemerintah ini sebagai suatu produk pakaian yang berukuran sama, atau satu ukuran dengan mempertanyakan, *Should one size fit all?*. Tentu saja pakaian yang dibuat dengan satu ukuran tidak bisa dipakai oleh semua orang, karena orang menggunakan ukuran pakaian yang berbeda-beda seperti ukuran S, M, L, XL bahkan ukuran XXL. Menurutnya, paling tidak, terdapat tiga kelemahan yang dapat diasumsikan dengan kurikulum 2013, yaitu:

1. Perencana kurikulum telah salah mengidentifikasi masalah, yaitu menganggap guru tidak sanggup merancang silabus sehingga menganggap obat mujarabnya adalah merancang kurikulum yang sama, satu ukuran, bersama dengan silabusnya untuk semua sekolah.
2. Seperti pakaian satu ukuran, kurikulum baru ini bisa cocok untuk satu sekolah tetapi belum tentu cocok untuk sekolah lainnya. Yang lebih mencemaskan lagi beberapa sekolah bisa terabaikan karena mereka memiliki masalah dan kebutuhan yang unik. Kurikulum yang mengasumsikan semua sekolah, fasilitas, guru dan siswa sama adalah kurang tepat.
3. Guru tidak dipercaya menyangkut kreativitas mereka dalam mengembangkan kurikulum berdasarkan kebutuhan kontekstual dan kebutuhan-kebutuhan unik di setiap daerah. Kurikulum 2013 diasumsikan bahwa guru akan disetir dari jarak jauh dengan menggunakan *remote control* universal yang disebut silabus. Sakhiyya juga mengutip Winston Churchill yang mengatakan bahwa “barang siapa yang gagal merencanakan berarti merencanakan kegagalan.”

Di samping itu, pengabaian pengajaran bahasa Inggris di sekolah dasar juga banyak dikritisi. Mereka berargumen bahwa bahasa Inggris merupakan mata pelajaran penting yang tidak semestinya dinomorduakan di sekolah-sekolah dasar sebab pendidikan juga menyiapkan peserta didik untuk mampu bersaing di tingkat global. Dalam kurikulum 2013, bahasa Inggris menjadi pelajaran minor atau elektif di sekolah dasar. Menurut mereka bahasa Inggris merupakan pelajaran penting yang harus diajarkan di sekolah sejak dini, karena dengan mempelajari bahasa Inggris peserta didik memiliki peluang untuk mendapatkan pendidikan yang lebih berkualitas, pekerjaan yang lebih baik dan dapat bersaing secara global.



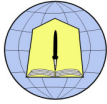
MASALAH GURU

Muhammad Nuh mengatakan bahwa untuk menyiapkan implementasi kurikulum 2013, kementerian akan membekali guru dengan pelatihan 52 jam dan sesi mentoring selama beberapa bulan pertama tahun pelajaran 2013/2014. Bagaimanapun, para aktivis, antara lain, ketua Forum Diskusi Guru (FSGI) Jakarta, Retno Listyarti (2013), mengutarakan bahwa 52 jam pelatihan tidak memadai untuk menyiapkan guru menerapkan kurikulum baru. Menurutnya, sulit untuk mengajarkan dan memaksa guru menerapkan kurikulum baru. Banyak pengamat pendidikan lainnya juga tidak setuju dengan jam pelatihan guru yang dianggap cukup singkat. Menurut mereka, pemerintah sebaiknya menyiapkan guru dulu dengan meningkatkan kompetensi mereka sebab penerapan kurikulum baru diperkirakan memang berat. Jadi, Muhammad Nuh dianggap terlalu tergesa-gesa menerapkan kurikulum baru dengan mengabaikan kesiapan guru.

Kurikulum 2013, sebagaimana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah jelaskan, merupakan perbaikan dari kurikulum 2004 dan 2006, yang merupakan kurikulum berbasis sekolah dan berbasis kompetensi. Namun, guru masih sedang mempelajari bagaimana melaksanakan kurikulum 2006. Sangat disesalkan, kebanyakan guru dan masyarakat umum tidak diinformasikan apa yang sebenarnya tidak beres dengan kurikulum 2006. Pemerintah seharusnya telah mempublikasikan data hasil evaluasi untuk mengidentifikasi aspek mana kurikulum 2013 yang bermasalah. Data semacam itu akan membuat perubahan kurikulum lebih masuk akal.

Hasil penelitian Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) (2013) menyangkut pelatihan dan persiapan implementasi kurikulum 2013 di 17 kabupaten/kota di 10 provinsi di tanah air menunjukkan bahwa terdapat sejumlah masalah krusial dan kegagalan sistemik pelatihan persiapan guru. Pelatihan tidak merubah *mindset* guru, yaitu menggunakan pendekatan tradisional, tutor berceramah, peserta mendengar. Dalam pelatihan tersebut tidak ditekankan pendekatan *scientific*, murid mengamati, bertanya, mencoba, mengeksplorasi dan berkomunikasi. Perubahan *mindset* guru ke pendekatan *scientific* tidak mudah dan butuh waktu bertahun-tahun untuk belajar dan membiasakan diri. Sayangnya, penerapan kurikulum 2013 dipaksakan secepatnya.

Bahkan dalam pelatihan tersebut hanya diminta satu hingga dua orang guru untuk terlibat. Akibatnya, pihak sekolah mengalami kesulitan memilih guru dan tentu saja sejumlah besar guru yang tidak terlibat dalam pelatihan tidak paham dengan mekanisme kurikulum 2013. Bahkan menurut hasil pantauan FSGI ada sekolah yang tidak tahu menahu tentang kurikulum 2013. Masih berhubungan dengan guru, ditemukan juga bahwa ada sejumlah guru yang bernasib malang akibat dari



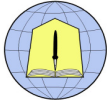
bertambahnya jam pelajaran dan penghapusan mata pelajaran seperti Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) di SLTP dan SLTA. Disamping itu, guru juga menjadi bingung karena di tingkat SMA, kurikulum 2013 tidak memiliki pedoman penjurusan. Juga tidak ada sosialisasi kepada ketua program keahlian di SMK. Ini membingungkan pihak sekolah, murid dan guru.

Selanjutnya, peleburan mata pelajaran di tingkat Sekolah Dasar juga menimbulkan masalah. Menurut Pengamat Pendidikan Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Suryadi (2013), peleburan tersebut akan menimbulkan masalah terutama terkait keberadaan guru. Ketika mata pelajaran dileburkan dan integrasikan, banyak guru yang sudah menjadi guru profesional kehilangan pekerjaan. Bahkan tidak bisa lagi menerima tunjangan profesi karena jam mengajarnya tidak cukup. Di samping itu, apa yang disebut pendekatan tematik integratif ini diakui banyak pihak sangat memberatkan guru. Begitu juga dengan pedoman kolaborasi kontekstual dan praktek yang tidak dirincikan dalam implementasi kurikulum 2013. Ini akan berpotensi merugikan siswa dan membingungkan guru.

Pihak wakil rakyat juga angkat bicara menyangkut kurikulum 2013. Anggota Komisi X DPR RI, Raihan Iskandar (2013) meminta pemerintah menunda implementasi kurikulum 2013, karena sosialisasi terutama kepada guru belum maksimal. Melalui kunjungan kerjanya ke Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan, Raihan menemukan bahwa para guru baru memahami kulitnya, tetapi belum menguasai isi kurikulum 2013. Banyak juga peserta seminar menyangkut kurikulum 2013 yang menyesali bahwa penerapan kurikulum 2013 tidak didahului dengan riset dan evaluasi yang mendalam. Akibatnya, kurikulum ini memberatkan siswa dan membingungkan guru. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa guru merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kurikulum. Bagaimanapun sempurna sebuah kurikulum yang dirancang, namun tanpa ditopang oleh kemampuan guru untuk mengimplementasikannya, kurikulum yang telah dirancang dengan bagus itu akan sia-sia (Sanjaya, 2009).

MASALAH LAINNYA

Masalah kurikulum 2013 lainnya seperti multi tafsir juga menjadi hambatan dalam implementasi kurikulum 2013. Sebagai contoh, kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik dalam aktivitas pembelajaran dengan lima langkah pokok: Mengamati, Menanya, Mengumpulkan informasi (explorasi), Mengasosiasi (menggunakan pengetahuan) dan Mengkomunikasikan. Menyangkut langkah terakhir, “Mengkomunikasikan” telah menimbulkan interpretasi yang berbeda meskipun itu



memang berbeda berdasarkan jenjang pendidikan. Ada yang menafsirkan “Mengkomunikasikan” sebagai menyampaikan atau mengkomunikasikan pengetahuannya setelah proses pembelajaran kepada orang lain atau teman sekelasnya baik secara lisan maupun tulisan. Namun, banyak juga yang menafsirkan “Mengkomunikasikan” itu maksudnya siswa berjejaring, menggunakan internet untuk mencari lagi *inquiry* atau memperdalam pengetahuannya dan menggunakan fasilitas internet seperti email untuk berkomunikasi dengan ahli di bidang tertentu.

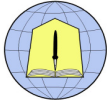
Rektor Unsyiah, Darni Daud, dalam suatu diskusi dengan penulis pernah mengatakan bahwa sulit menerapkan kurikulum 2013, kurikulum berkarakter di Indonesia karena siswa tidak mudah mendapatkan contoh tauladan yang bisa mereka tiru atau ikuti dari orang dewasa. Di kalangan orang dewasa terjadi penyelewengan, konspirasi, nepotisme dan korupsi yang semakin merajalela. Tidak terlihat secara jelas implementasi norma-norma hukum dan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.

Dekan FIP Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Ahman, dalam ceramahnya di acara Rapat Koordiansi PPG di Bandung pada bulan Juli 2013 mengisyaratkan bahwa untuk mendidik siswa dengan kurikulum berkarakter perlu adanya asrama untuk setiap sekolah. Jadi, semua siswa mulai dari tingkat SD, SLTP dan SLTA harus diasramakan agar mereka bisa mempraktekkan pengetahuannya dan menjalankan domain afektifnya. Tentu saja ini sesuatu yang hampir tidak mungkin dilaksanakan dalam waktu singkat karena butuh dana untuk membangun asrama dan fasilitasnya yang cukup besar.

Ada juga yang mempertanyakan kenapa Pendekatan Saintifik yang diterapkan. Sedangkan rekomendasi ahli psikolog pembelajaran adalah Konstruktivisme, karena Teori Konstruktivisme merupakan penyempurnaan dari teori-teori utama pembelajaran sebelumnya, Behaviorisme dan Kognitivisme. Bahkan, ada pihak yang mengkritik dengan sinis bahwa pendekatan yang digunakan merupakan Pendekatan Saintifik, tetapi kenapa sainsnya banyak dibuang.

KEPEMIMPINAN INSTRUKSIONAL KEPALA SEKOLAH

Kepemimpinan Instruksional atau Pemimpin Pengajaran berbeda dari tugas kepala sekolah sebagai pengatur atau manajer dalam banyak hal. Para kepala sekolah yang membanggakan diri mereka sebagai manajer, biasanya terlalu fokus dengan tugas-tugas administratif yang ketat dibandingkan dengan kepala sekolah yang berperan sebagai Pemimpin Instruksional. Peran yang terakhir melibatkan penentuan tujuan-tujuan (*goals*) yang jelas, pengalokasian sumberdaya untuk pengajaran (*instruction*), pengurusan kurikulum, pemantauan rencana pembelajaran (*lesson plans*), dan evaluasi

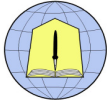


para guru. Singkat kata, kepemimpinan instruksional adalah aksi-aksi yang seorang kepala sekolah lakukan, atau delegasikan kepada orang lain, untuk meningkatkan pembelajaran siswa (Flath, 1989). Sebaliknya, Pemimpin Instruksional memprioritas atau mengutamakan kualitas pengajaran sebagai prioritas utama sekolah dan berusaha untuk mewujudkan visi itu menjadi kenyataan.

Menurut Hoy dan Hoy (2009), sekolah-sekolah dibangun untuk proses belajar mengajar, sedangkan kegiatan lainnya hanya merupakan penunjang bagi terlaksananya kegiatan belajar mengajar dengan baik. Sekarang, definisi kepemimpinan pengajaran telah meluas kepada keterlibatan yang lebih dalam ke urusan utama persekolahan, yaitu belajar mengajar. Perhatian telah berubah dari mengajar ke pembelajaran, dan sebagian orang telah mengusulkan istilah “pemimpin pembelajaran” sebagai pengganti “pemimpin pengajaran” (Dufour, 2002). *The National Association of Elementary School Principals* (NAESP, 2001) mendefinisikan kepemimpinan pengajaran sebagai “memimpin komunitas belajar”.

Konsep komunitas belajar adalah para staf (guru) bertemu secara regular untuk mendiskusikan pekerjaan mereka, bekerja bersama-sama untuk memecahkan masalah, berefleksi tentang pekerjaan mereka, dan bertanggung jawab terhadap apa yang mereka pelajari. Mereka beroperasi dalam jaringan keahlian yang saling berbagi dan melengkapi bukannya dalam hirarkhi atau isolasi. Orang di dalam komunitas belajar “memiliki masalah” dan menjadi agen-agen bagi solusinya. Guru berdiskusi memecahkan masalah pembelajaran siswa. Guru saling berbagi pengalaman dan pengetahuan yang bertujuan untuk mendongkrak prestasi siswa. Pemimpin pengajaran juga memprioritaskan pembelajaran sesama guru, menentukan harapan-harapan yang tinggi, menciptakan budaya belajar yang terus menerus bagi guru, dan menggalang dukungan komunitas untuk keberhasilan sekolah.

Blase dan Blase (2000) mengekspresikan kepemimpinan pengajaran dengan tingkah laku khusus seperti memberi saran-saran, memberi masukan (feedback), menawarkan model pembelajaran yang efektif, meminta pendapat, mendukung kolaborasi, menyediakan kesempatan pengembangan profesional, dan memberi penghargaan atau pujian atas pengajaran yang efektif. Hallinger at al., (1994) menyarankan kepala sekolah sebagai pemimpin pengajaran menciptakan lingkungan sekolah dimana guru dapat mengajar lebih efektif dan siswa dapat belajar lebih baik. Fidler (1997) berargumen bahwa kepemimpinan pengajaran merupakan “kepemimpinan kurikulum”, sebab menurutnya kepala sekolah adalah pihak yang paling tepat untuk mengkoordinasi, mengintegrasikan, mengimplementasikan dan



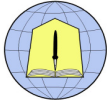
mensupervisi program pengajaran (kurikulum) agar dapat memastikan hasil (*outcomes*) yang diharapkan tercapai.

Menurut Hallinger & Murphy (1985) Kepemimpinan Instruksional (*Instructional Leadership*) memiliki tiga dimensi, yaitu: merumuskan visi-misi sekolah, mengelola program pengajaran (kurikulum), dan menciptakan iklim pembelajaran sesama guru. Jadi, kepala sekolah yang menerapkan Kepemimpinan Instruksional dalam memimpin sekolah menjalankan tiga dimensi tersebut sebagai perwujudan dari keberpihakan atau prioritas kepemimpinannya kepada akademik.

KESIMPULAN

Kekuatiran banyak pihak menyangkut kesuksesan implementasi kurikulum 2013 adalah menyangkut kesiapan guru. Aktor utama yang dapat mempengaruhi guru adalah kepala sekolah. Kepemimpinannya akan berpengaruh langsung terhadap kinerja guru. Setelah kita pahami konsep Kepemimpinan Instruksional, kita yakin konsep ini akan menjadi salah satu solusi terhadap kekisruhan penerapan kurikulum 2013 yang telah menuai banyak kritik dan protes dari berbagai kalangan. Winataputra (2013) yang merupakan salah satu tokoh pendidikan nasional yang terlibat langsung dalam perumusan kurikulum 2013, dalam suatu pertemuan Rapat Perumusan Kurikulum PPG (Pendidikan Profesi Guru) di Palembang pada 15 Januari 2014, mengatakan bahwa untuk suksesnya penerapan kurikulum 2013, kepala sekolah harus berfungsi sebagai *Instructional Leader* (pemimpin instruksional).

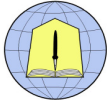
Berdasarkan konsep Kepemimpinan Instruksional, di samping merumuskan dan mensosialisasikan visi-misi sekolah, pemimpin instruksional harus selalu *concern* dengan kurikulum. Kepala sekolah semacam ini selalu mengkoordinasikan kurikulum, mensupervisi dan mengevaluasi kurikulum, dan memonitor kemajuan siswa. Pemimpin Instruksional juga selalu fokus pada penciptaan iklim pembelajaran sesama guru (*Developing School Learning Climate Program*). Salah satu elemen daripada dimensi ini adalah perhatian kepala sekolah terhadap peningkatan profesionalisme guru, antara lain, seperti melalui MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran). Oleh karena itu, kepala sekolah terutama yang memposisikan diri sebagai *Instructional Leader* akan memainkan peran yang sangat menentukan dalam menyukseskan penerapan kurikulum 2013. Kepala sekolah dapat mengintervensi pemberlakuan kurikulum 2013 melalui pengelolaan kurikulum dan program pengembangan profesi guru di sekolah.



Selama ini yang dilibatkan dalam pelatihan penerapan kurikulum 2013 hanya satu sampai dua orang guru saja. Seharusnya, alangkah tepatnya jika kepala sekolah yang diberi pemahaman secara mendalam, di samping guru, menyangkut implementasi kurikulum 2013, karena kepala sekolah adalah salah satu pihak yang paling bertanggungjawab atas keberhasilan penerapan kurikulum 2013. Sejumlah besar hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sekolah-sekolah unggul umumnya dipimpin oleh *Instructional Leader*. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa jika prestasi siswa hendak ditumbuhkan dan reputasi sekolah didongkrak, otoritas yang terkait dalam pengangkatan kepala sekolah seyogianya memastikan bahwa yang dinominasikan sebagai kepala sekolah mestilah yang berwawasan instruksional atau yang memberi prioritas pada kepentingan akademik, *Instructional Leader*.

DAFTAR PUSTAKA

- Blasé, J., & Blasé, J. (2000). Effective instructional leadership: Teachers' perspectives on how principals promote teaching and learning in schools. *Journal of Educational Administration*, 38(2), 130-41.
- Dufour, R. (2002). The learning-centered principal. *Educational Leadership*, 59(8), 12-15.
- Findley, B., & Findley, D. (1992). Effective schools: The role of the principal. *Contemporary Education*, 63(2), 102-104.
- Flath, B.(1989). The principal as instructional leader. *ATA Magazines*, 69(3), 19-22, 49.
- Hallinger, P., Bickman, L., & Davis, K. (1996). School context, principal leadership, and student reading achievement. *Elementary School Journal*, 96(5), 527-550.
- Hallinger, P., & Murphy, J. (1985). Assessing the instructional behavior of principals. *Elementary School Journal*, 86, 217-247.
- Hamalik, Oemar. (2012). *Kurikulum dan pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hoy, A. W., & Hoy, W. K. (2009). *Instructional leadership: A research-based guide to learning in schools*. Boston, MA: Pearson.
- Mulyasa. (2013). *Pengembangan dan implementasi kurikulum 2013*. Banung: Rosdakarya.
- National Association of Elementary School Principals. (NAESP) (2001). Leading Learning Communities: Standards for what principals should know and be able to do. Retrieved from <http://www.naesp.org/resources/1/Pdfs/LLCz-es.pdf>
- Sakhiyya, Zulfa. (2013, February 23). National curriculum 2013: Should one-size-fits all? *The Jakarta Post*, p. 6 (opinion).
- Sanjaya, W. (2009). *Kurikulum dan pembelajaran*. Jakarta: Kencana.
- Saragih, Bagus. (2013, February 19). Future of Indonesia depends on new curriculum: Minister. *The Jakarta Post*, p.4 (National).



-
- Sukmadinata, N. S. (2008). *Pengembangan kurikulum: Teori dan praktek*. Bandung: Rosdakarya.
- Suparlan. (2012). *Tanya jawab pengembangan kurikulum & materi pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suryadi. (2013, Maret 5). Kurikulum 2013 masih mentah dan timbulkan masalah. *Kompas.com*
- Winataputra, U. S. (2013). Program pengembangan: Pembelajaran berbasis keilmuan (Scientific-Oriented Instruction), pengantar asistensi bansos pengimbasan implementasi kurikulum 2013. Makalah dipresentasikan pada Rapat Perumusan Kurikulum PPG, Palembang.